



PROGRAM PERMUKIMAN

Pemkot Tata 8 Ha Kawasan Kumuh

UMBULHARJO—Hingga saat ini, kawasan kumuh di Kota Jogja masih mencapai puluhan hektare (ha). Tahun ini, Pemkot Jogja akan menangani delapan hektare kawasan kumuh yang tersebar di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Sigit Setiawan, menyampaikan luas kawasan kumuh di Kota Jogja mencapai 50,7 ha. Dengan luasan tersebut, DPUPKP menargetkan penanganan kawasan kumuh sekitar 8 ha/tahun.

"Kami menargetkan minimal delapan hektare tertangani setiap tahun. Jika ada dukungan dari APBN, kami berharap seluruh kawasan kumuh bisa tuntas pada 2029," katanya, Sabtu (2/8).

Kawasan kumuh tersebut sebagian besar berada di sekitar bibir sungai. Indikator yang menyebabkan kawasan tersebut kumuh sebagian besar lantaran permasalahan sanitasi yang ada. Di kawasan ini, beberapa rumah masih membuang limbah domestik langsung ke sungai karena tidak memiliki *septic tank*.

Untuk rumah yang tidak memiliki *septic tank*, DPUPKP menggunakan IPAL komunal untuk pengelolaan limbah. Tahun ini, Pemkot akan membangun IPAL komunal di Kotabaru, Sorosutan, dan Terban. "IPAL komunal menjadi solusi karena banyak warga yang membuat *septic tank* di dalam rumah, itu tidak ideal. Maka, kami sediakan IPAL bersama dan jaringan pipa menuju sungai. Di atasnya bisa ditungskan sebagai jalan inspeksi," katanya.

Selain itu, Pemkot juga akan menangani rumah yang ada di beberapa kawasan kumuh tersebut, antara lain di Pringgokusuman, Kotabaru, dan Cokrodingratan. Untuk kawasan Kotabaru dan Pringgokusuman, penangan kawasan kumuh dimulai dengan tahap konsolidasi tanah lantaran rumah terlalu dekat dengan bantaran sungai dan tidak memiliki pengelolaan limbah domestik.

Beberapa lahan di kawasan itu juga lahan *Sultan Ground* (SG) sehingga jajarannya harus bekerjasama dengan Panitikismo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jogja untuk penataan.

Untuk mendukung program ini, DPUPKP Kota Jogja mengalokasikan anggaran dari APBD Kota Jogja lebih dari Rp7 miliar pada 2025. Dana ini termasuk untuk pembangunan IPAL, konsolidasi lahan, penataan rumah, serta penyambungan jaringan limbah rumah tangga.

"Kami tata ulang tanahnya, menyiapkan masterplan bersama warga, kemudian rumah digeser agar tersedia ruang untuk jalan, IPAL komunal, bahkan ruang terbuka hijau," katanya.

(Stefani Yuliananti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005